

ANALISIS PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DALAM PEMBANGUNAN FASILITAS PUBLIK: STUDI KASUS ALUN-ALUN BANGKALAN

Malaikatul Jannah Duhita Wahyuningtyas¹, Yuanita Maharani², Mohamad Djasuli³
^{1, 2, 3}Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang Madura, Jawa Timur, Indonesia
Email: 240221100188@student.trunojoyo.ac.id

Article History

Received: 21-05-2026

Revision: 02-06-2026

Accepted: 04-06-2026

Published: 06-06-2026

Abstract. This study aims to analyze the impact of the utilization of regional tax revenue sharing funds on the development of public facilities in Bangkalan Regency with a focus on Bangkalan Square as the main public space for the community. The study uses a qualitative approach with a case study method. Data were obtained through field observations, semi-structured interviews, and documentation. Research informants were selected using a purposive sampling technique, namely residents who actively utilize Bangkalan Square facilities. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive analysis model which includes the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that the development of public facilities in Bangkalan Square has a positive impact in the form of improving the function of public spaces, community social activities, and economic activities around the area. However, the utilization of these facilities has not been optimal due to weak management, facility maintenance, and low public understanding of the role of regional taxes in development. This study has implications that local governments need to improve the effectiveness of public fund management, strengthen public facility maintenance, and improve tax education to the community to support sustainable development.

Keywords: Local Taxes, Revenue Sharing Funds, Public Facilities, Regional Development

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pemanfaatan dana bagi hasil pajak daerah terhadap pembangunan fasilitas umum di Kabupaten Bangkalan dengan fokus pada Alun-Alun Bangkalan sebagai ruang publik utama masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu masyarakat yang aktif memanfaatkan fasilitas Alun-Alun Bangkalan. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas umum di Alun-Alun Bangkalan memberikan dampak positif berupa peningkatan fungsi ruang publik, aktivitas sosial masyarakat, serta kegiatan ekonomi di sekitar kawasan. Namun, pemanfaatan fasilitas tersebut belum optimal akibat masih lemahnya pengelolaan, pemeliharaan sarana, dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai peran pajak daerah dalam pembangunan. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas pengelolaan dana publik, memperkuat pemeliharaan fasilitas umum, serta meningkatkan edukasi perpajakan kepada masyarakat guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil, Fasilitas Umum, Pembangunan Daerah

How to Cite: Wahyuningtyas, M. J. D., Maharani, Y., & Djasuli, M. (2026). Analisis Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dalam Pembangunan Fasilitas Publik: Studi Kasus Alun-Alun Bangkalan. *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 4 (3), 1691-1700. <http://doi.org/10.54373/hijm.v4i3.5929>

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan ekonomi, serta mendorong pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, termasuk sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan daerah. Suatu wilayah memerlukan pembangunan yang mampu mendorong kemandirian dan perkembangan ekonomi daerah secara berkelanjutan (Indiastini et al., 2026). Salah satu bentuk pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat adalah penyediaan fasilitas umum, seperti taman kota, ruang terbuka hijau, sarana olahraga, dan ruang publik lainnya. Dalam konteks pembangunan daerah, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan wilayah. Keterlibatan masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari program yang dilaksanakan (Ma'rifat & Suraharta, 2024). Oleh karena itu, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Abidin, 2018). Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan, pajak daerah juga berperan dalam mendukung stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah (Khasanah & Susilowati, 2025). Selain pajak daerah, pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan dari dana bagi hasil pajak daerah. Dana ini berperan penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah karena memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan sesuai karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing (Kristina, 2025). Dana bagi hasil pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan fasilitas umum dan pelayanan publik (Novitasari et al., 2024; Nisa, 2017).

Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur memanfaatkan dana bagi hasil pajak daerah untuk mendukung berbagai program pembangunan, termasuk pembangunan fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara langsung (Sitri et al., 2023). Pembangunan fasilitas publik di Kabupaten Bangkalan diharapkan mampu mendukung aktivitas sosial masyarakat, memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal, serta

meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dana bagi hasil pajak daerah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah (Ira, 2021). Selain itu, peningkatan pendapatan daerah juga berhubungan dengan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah (Humaira, 2025; Khasanah & Susilowati, 2025). Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek fiskal dan ekonomi makro daerah, sementara kajian mengenai pemanfaatan dana bagi hasil pajak daerah dalam pembangunan fasilitas umum serta dampaknya terhadap masyarakat masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian terkait pemanfaatan dana bagi hasil pajak daerah untuk pembangunan fasilitas umum berbasis ruang publik, khususnya di Kabupaten Bangkalan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan Alun-Alun Bangkalan sebagai studi kasus untuk menganalisis dampak pembangunan fasilitas umum yang didanai dari dana publik serta persepsi masyarakat sebagai pengguna langsung fasilitas tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan dana bagi hasil pajak daerah dalam pembangunan fasilitas umum, mengidentifikasi dampaknya terhadap masyarakat, serta memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan fasilitas publik secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih dikarenakan dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, terutama kondisi fasilitas umum dan pemanfaatannya oleh masyarakat di kawasan Alun-Alun Bangkalan. Metode studi kasus dipakai untuk memusatkan analisis pada satu objek spesifik secara lebih detail dan kontekstual. Teknik penentuan informan dilaksanakan menerapkan *purposive sampling*, merupakan pemilihan responden dengan sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan meliputi: (1) masyarakat yang pernah atau sering memanfaatkan fasilitas Alun-Alun Bangkalan, dan (2) pedagang atau pelaku usaha di sekitar kawasan Alun-Alun Bangkalan.

Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui tiga metode utama, diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi sebagai metode pengumpulan keterangan maupun data yang dilaksanakan dengan pengamatan juga pencatatan secara tersusun terhadap fenomena yang menjadi objek pengamatan (Mania, 2008). Observasi dilaksanakan secara partisipatif langsung di lokasi penelitian guna mengamati kondisi fisik fasilitas umum serta pola aktivitas masyarakat. Wawancara sebagai proses tanya jawab secara lisan diantara dua orang atau lebih guna memperoleh pendapat dan perspektif seseorang mengenai suatu isu, yang

diawali dengan pertemuan langsung antara para pihak yang terlibat (Maulida Aprina, Tridays Repelita, Muhammad Endrian, 2025). Wawancara dilakukan dengan format semi-terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi informasi secara mendalam sekaligus terarah sesuai dengan tujuan penelitian. Dokumentasi direalisasikan melalui pengambilan foto dan data pendukung yang relevan. Validitas data diperiksa melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilaksanakan melalui membandingkan tanggapan antar informan, akan tetapi untuk triangulasi metode dilaksanakan melalui menyocokkan data dari wawancara, observasi, serta dokumentasi. Teknik ini terdapat tujuan untuk meningkatkan keabsahan data dan mengurangi subjektivitas peneliti.

Teknik analisis data menerapkan analisis deskriptif kualitatif, dengan mengacu pada tahapan reduksi data, penyajian data, juga penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara terlebih dahulu ditranskripsikan, kemudian dilakukan *coding* berdasarkan tema-tema utama, seperti tingkat pemahaman masyarakat mengenai pajak daerah, dampak pembangunan fasilitas umum, serta harapan masyarakat terhadap pengelolaan fasilitas publik. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dan diinterpretasikan dengan mengaitkan temuan lapangan pada teori serta penelitian terlebih dahulu. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menyajikan gambaran mendalam mengenai implikasi pembangunan dan penataan Alun-Alun Bangkalan terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat, sekaligus mengidentifikasi aspek pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas umum yang memerlukan peningkatan, sehingga utilisasi fasilitas tersebut dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan

HASIL DAN DISKUSI

Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah

Hasil wawancara menandakan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai pajak daerah masih beragam. Sebagian informan telah memahami bahwa pajak daerah merupakan iuran masyarakat yang digunakan untuk pembangunan daerah, namun Sebagian lainnya masih memiliki pemahaman yang terbatas. Salah satu informan menyampaikan bahwa pajak daerah adalah “iuran wajib yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah daerah untuk pembangunan atau fasilitas umum”. Pernyataan ini menunjukkan adanya pemahaman yang cukup baik mengenai fungsi pajak daerah sebagai sumber pembiayaan publik. Namun demikian, beberapa informan lain menyatakan belum memahami secara jelas mengenai pajak daerah. Salah satu responden menyampaikan bahwa dirinya hanya mengetahui “pajak motor”, sedangkan informan lain menyatakan kurang memahami penggunaan pajak daerah secara rinci.

Temuan ini menunjukkan bahwa literasi fiskal masyarakat masih belum merata. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pajak daerah dapat memengaruhi Tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Temuan ini sejalan dengan (Maulia & Lestari, 2025) yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak salah satunya adalah pemahaman terkait pajak. Selain itu, mayoritas responden juga tidak mengetahui bahwa pembangunan fasilitas umum di Alun-Alun Bangkalan salah satu sumber pendanaannya berasal dari dana bagi hasil pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih perlu meningkatkan transparansi informasi dan edukasi publik mengenai penggunaan anggaran pembangunan.

Dampak Positif Pembangunan Fasilitas Umum

Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat

Salah satu pedagang menyatakan bahwa kondisi Alun-Alun yang semakin baik membuat pengunjung semakin ramai sehingga berpengaruh terhadap kegiatan jual beli. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ruang publik tidak hanya berdampak pada estetika kota, tetapi juga menciptakan efek ekonomi bagi masyarakat sekitar. Secara analitis, keberadaan fasilitas public yang nyaman akan meningkatkan mobilitas masyarakat dan mendorong terbentuknya aktivitas ekonomi informal, seperti pedagang kaki lima, usaha makanan, dan jasa lainnya. Dengan demikian, Alun-Alun Bangkalan tidak sebatas memiliki fungsi ruang rekreasi, namun juga menjadi ruang ekonomi dengan menunjukkan manfaat langsung bagi kelompok usaha kecil.

Meningkatkan Aktivitas Olahraga dan Kesehatan

Beberapa informan menyampaikan bahwa fasilitas yang tersedia cukup membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas olahraga. Salah satu responden menyatakan:

“Lumayan lah buat jogging-jogging, olahraga, karena sudah difasilitasi juga,”
(Informan 5).

Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa lapangan sepak bola dan area olahraga di Alun-Alun Bangkalan dimanfaatkan secara aktif oleh masyarakat pada pagi maupun sore hari. Temuan ini menunjukkan bahwa fasilitas yang dibangun telah berfungsi sesuai dengan tujuan penyediaannya, yaitu mendukung aktivitas fisik dan rekreasi masyarakat. Secara teoritis, keberadaan fasilitas publik yang mudah diakses dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga karena mengurangi hambatan biaya dan aksesibilitas (Carmona et al., 2021). Dengan tersedianya sarana olahraga gratis, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih

besar untuk menerapkan gaya hidup sehat tanpa harus bergantung pada fasilitas komersial. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sitri et al. (2023) yang menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas publik mampu meningkatkan pemanfaatan ruang kota sebagai sarana aktivitas fisik dan rekreasi masyarakat. Selain mendukung aktivitas olahraga, pembangunan Alun-Alun Bangkalan juga berkontribusi terhadap peningkatan kenyamanan lingkungan dan interaksi sosial masyarakat. Salah satu informan menyatakan:

“Tempatnya lebih nyaman, bersih, dan tertata” (Informan 2).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menilai fasilitas dari aspek fisiknya, tetapi juga dari kualitas lingkungan yang tercipta setelah pembangunan dilakukan. Menurut teori ruang publik yang dikemukakan oleh Carr et al. (1992), ruang publik yang nyaman, aman, dan tertata memiliki fungsi penting sebagai tempat berkumpul, berinteraksi, dan membangun kohesi sosial. Dalam konteks penelitian ini, Alun-Alun Bangkalan tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas rekreasi, tetapi juga sebagai ruang sosial yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Gehl (2011) yang menjelaskan bahwa kualitas ruang publik yang baik mampu meningkatkan intensitas interaksi sosial serta memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, pembangunan fasilitas umum melalui pemanfaatan dana publik tidak hanya menghasilkan manfaat fisik, tetapi juga memberikan dampak sosial yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dampak Negatif Fasilitas Umum

Fasilitas Toilet Tidak Dapat Digunakan

Hasil observasi menunjukkan bahwa kamar mandi umum dalam kondisi terbengkalai dan terkunci sehingga tidak dapat digunakan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik belum diikuti dengan pemeliharaan yang memadai. Secara analitis, toilet umum merupakan kebutuhan dasar di ruang public. Ketika fasilitas ini tidak berfungsi, maka kualitas pelayanan publik menurun. Temuan ini tidak sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya keberlanjutan manfaat fasilitas umum.

Genangan Air Pada Area Tempat Duduk

Pada area tempat duduk melingkar ditemukan genangan air setelah hujan sehingga fasilitas tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem *drinase* dan kurangnya perawatan fasilitas. Secara analitis, kualitas pembangunan publik tidak hanya

diukur dari keberadaan sarana, tetapi juga dari kenyamanan dan fungsi jangka panjang fasilitas tersebut.

Kurangnya Daya Tarik Kawasan

Salah satu informan menyampaikan bahwa Alun-Alun Bangkalan masih kurang menarik dibandingkan ruang publik di daerah lain. Informan menyatakan:

“Percuma aja luas kalau ujung-ujungnya nggak ada daya tarik buat orang tertarik masuk ke dalamnya.” (Informan 7)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan ruang publik yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat beraktivitas, tetapi juga memiliki daya tarik visual, identitas kawasan, dan pengalaman ruang yang mampu menarik kunjungan masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pembangunan fasilitas umum tidak dapat diukur hanya dari ketersediaan sarana fisik, tetapi juga dari kualitas desain dan kemampuan ruang publik dalam memenuhi kebutuhan sosial serta rekreasi masyarakat. Dalam perspektif perencanaan kota, ruang publik yang berkualitas harus mampu menggabungkan aspek fungsional, estetika, kenyamanan, dan daya tarik sehingga dapat menjadi pusat aktivitas masyarakat (Carmona et al., 2021).

Secara kritis, temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keberhasilan pembangunan fisik dan tingkat kepuasan pengguna. Meskipun Alun-Alun Bangkalan telah menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan masyarakat, sebagian pengguna masih menilai bahwa kawasan tersebut belum memiliki karakter atau atraksi yang cukup kuat untuk meningkatkan minat kunjungan. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Gehl (2011) yang menyatakan bahwa kualitas ruang publik tidak hanya ditentukan oleh luas area atau jumlah fasilitas yang tersedia, tetapi juga oleh kemampuan ruang tersebut dalam menciptakan pengalaman sosial yang menarik dan bermakna bagi penggunanya. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak hanya perlu berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada penguatan identitas kawasan melalui elemen estetika, kegiatan komunitas, ruang kreatif, dan program publik yang dapat meningkatkan daya tarik Alun-Alun Bangkalan sebagai ruang publik yang hidup dan berkelanjutan.

Harapan Masyarakat Terhadap Pengembangan Fasilitas

Mayoritas informan berharap pemerintah terus meningkatkan kualitas fasilitas yang ada. Salah satu informan menyampaikan:

“Saya berharap pemerintah terus meningkatkan fasilitas, menjaga kebersihan, serta menambah, sarana yang lebih lengkap agar masyarakat semakin nyaman dan aman.”
(informan 2)

Informan lain juga menyampaikan pentingnya peningkatan penerangan dan penataan Kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mendukung penggunaan dana pajak daerah selama manfaatnya dapat dirasakan secara nyata. Secara analitis, harapan masyarakat menunjukkan bahwa pembangunan yang telah dilakukan diapresiasi, namun kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan agar sesuai ekspektasi pengguna.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas umum di Alun-Alun Bangkalan yang didukung dana bagi hasil pajak daerah telah memberikan dampak positif berupa peningkatan aktivitas ekonomi, olahraga, interaksi sosial, dan kenyamanan masyarakat. Namun demikian, efektivitas pembangunan belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan masalah pada aspek pemeliharaan fasilitas, kualitas teknik sarana, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pajak daerah. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan publik tidak hanya ditentukan dari banyaknya anggaran, namun juga dari tata kelola fasilitas, transparansi penggunaan dana, serta orientasi pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah harus menyeimbangkan pembangunan fisik dengan pemeliharaan berkelanjutan dan edukasi publik agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, mampu diperoleh kesimpulan mengenai pemanfaatan dana bagi hasil pajak daerah dalam pembangunan fasilitas umum di Alun-Alun Bangkalan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Manfaat tersebut terlihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi pedagang sekitar, tersedianya sarana olahraga yang mendorong pola hidup sehat, serta terciptanya ruang publik yang lebih nyaman untuk rekreasi dan interaksi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa dana publik yang dikelola secara tepat mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas pembangunan belum sepenuhnya optimal. Beberapa fasilitas masih mengalami kendala, seperti toilet umum yang tidak berfungsi, genangan air pada area tempat duduk, serta kurangnya daya tarik visual dan identitas kawasan. Selain itu, tingkat

pemahaman masyarakat mengenai pajak daerah dan dana bagi hasil pajak daerah masih relatif rendah, sehingga masyarakat belum sepenuhnya memahami hubungan antara kewajiban pajak dengan manfaat pembangunan yang diterima.

Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperluas kajian mengenai dana bagi hasil pajak daerah yang selama ini lebih banyak ditinjau dari aspek keuangan makro, menjadi perspektif manfaat langsung terhadap pembangunan fasilitas umum dan persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Studi kasus di Alun-Alun Bangkalan menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan fiskal daerah tidak sebatas diukur pada besarnya penerimaan, namun juga pada kualitas pemanfaatannya dalam pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah perlunya pemerintah daerah meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas umum secara berkelanjutan, bukan hanya berfokus pada pembangunan fisik semata. Pemerintah juga perlu memperkuat transparansi anggaran serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peran pajak daerah dalam pembangunan. Dengan demikian, kepercayaan publik dapat meningkat dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah menjadi lebih kuat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan jumlah informan yang lebih luas serta membandingkan beberapa fasilitas publik di daerah lain, sehingga didapatkan deskripsi secara lebih komprehensif terkait efektivitas pemanfaatan dana pajak daerah dalam pembangunan fasilitas umum.

REFERENSI

- Abidin, A. A. (2018). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana bagi hasil pajak terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya.
- Adegustara, F., Syofiarti, & Fadli, T. (2009). Artikel fundamental. p. 45.
- Carmona, M., Heath, T., Oc, T., & Tiesdell, S. (2021). *Public places urban spaces: The dimensions of urban design*. Routledge.
- Carr, S., Francis, M., Rivlin, L. G., & Stone, A. M. (1992). *Public space*. Cambridge University Press.
- Gehl, J. (2011). *Life between buildings: Using public space*. Island Press.
- Humaira, S., & Wulandari, D. W. (2025). Pengaruh pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 14(3).
- Indiastini, E. P., Wicaksono, A. D., & Wijayanti, W. P. (2026). Kajian kesenjangan wilayah di Kabupaten Bangkalan. 15(0341), 279–290.
- Ira, I. (2021). Pengaruh dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Berau. 4(1), 61–68.
- Khasanah, P. C., & Susilowati, L. (2025). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian daerah di kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur tahun 2018–2023. 5(2), 747–758.

- Kristina, N. (2025). *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) terhadap belanja modal pemerintah daerah di kabupaten/kota di Jawa Timur* [Skripsi]. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro.
- Mania, S. (2008). Observasi sebagai alat evaluasi dalam dunia pendidikan dan pengajaran. *11*(2), 220–233.
- Ma'rifat, R. A., Suraharta, I. M., & Jaya, I. I. (2024). [Judul artikel belum lengkap]. *2*, 306–312.
- Maulia, N. I., & Lestari, E. P. (2025). Strategi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pajak daerah. *Jurnal Penelitian Nusantara*, *1*, 594–600.
- Maulida Aprina, M., Repelita, T., Endrian, M., & Ningsih, P. (2025). Kemampuan komunikasi dalam menghadapi wawancara kerja. *11*, 228–234.
- Nisa, A. A. (2017). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan bagi hasil pajak terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, *1*(2), 203–214.
- Novitasari, E. A., Pravasanti, Y. A., & Ma, M. H. (2024). Pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, dan bagi hasil pajak retribusi terhadap belanja desa (studi empiris di desa se-Kecamatan Delanggu tahun 2018–2022). *3*(2), 497–504.
- Sitri, F., Hanif, N., & Seputro, Y. (2023). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi daerah serta dampaknya terhadap PAD Kabupaten Bangkalan. *2*(1), 105–112.